



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 826/VII/2014

IV/JULI 2014



Komisi V Pantau Kesiapan Bandara Ngurah Rai Sambut Mudik



KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA AGUSTUS 2014

Masa Sidang IV 2013-2014 telah berakhir pada 10 Juli 2014 dan telah memasuki Masa Reses IV 2013-2014 hingga 14 Agustus 2014. Konsentrasi kegiatan Dewan saat ini adalah persiapan Pidato Kenegaraan Presiden RI di hadapan sidang bersama DPR dan DPD, Pidato Pembukaan Masa Persidangan I tahun Sidang 2014-2015 pada tanggal 15 Agustus 2014. Intisari 2 RUU yang telah diputuskan menjadi inisiatif DPR yaitu: RUU tentang Kebudayaan dan RUU tentang Sistem Perbukuan. Berikut pelaksanaan fungsi-fungsi DPR yang kami ringkaskan.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Persiapan Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 15 Agustus

Memenuhi Tata Tertib DPR, maka agenda sidang Paripurna Pidato Kenegaraan DPR yang seharusnya jatuh pada tanggal 16 Agustus tiap tahun, diajukan menjadi tanggal 15 Agustus karena pada tanggal 16 Agustus jatuh pada hari Sabtu. Pidato Kenegaraan presiden ini dilakukan dalam forum Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI. Sidang bersama ini menggambarkan adanya kebersamaan antara dua lembaga parlemen yang menghadirkan Presiden selaku kepala Pemerintahan, sebagai bentuk proses demokrasi yang telah berjalan selama ini. Sidang bersama ini merupakan prosesi simbolik pertanggungjawaban politik kebangsaan dan kenegaraan dari tiga lembaga, yang bekerja untuk kemaslahatan bangsa.



Dalam pidato pengantar, Ketua DPR selaku tuan rumah sidang bersama, akan menyampaikan sedikit ulasan mengenai makna kemerdekaan RI yang ke-69. Peringatan kemerdekaan akan dijadikan momentum yang berharga bagi segenap bangsa Indonesia, karena beberapa bulan sebelumnya telah terjadi proses demokrasi yang berjalan secara baik, sukses, lancar dan aman yaitu dua Pemilu 2014, Pemilu legislatif 9 April dan pemilu Presiden 9 Juli. Ketua DPR dipastikan akan sedikit menyampaikan ulasan tentang hasil 2 Pemilu tersebut.

Agenda hari itu, 15 Agustus, juga dilakukan Sidang Pari-

purna DPR yang juga dihadiri oleh anggota DPD dalam rangka pembukaan Masa Persidangan I tahun sidang 2014-2015, dan Pidato RAPBN 2015. Dalam pidato pembukaan ini, Ketua DPR akan menyampaikan mengenai tugas-tugas fungsional lembaga DPR selama Masa persidangan I, yaitu tugas di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan.

Khusus mengenai tugas di bidang anggaran, Ketua DPR akan melaporkan secara garis besar hasil pembicaraan penyusunan RAPBN 2015 yang telah diselesaikan oleh Badan Anggaran DPR. Dalam laporan Badan Anggaran dikemukakan bahwa telah tercapai Pokok-Pokok kesepakatan dalam pembicaraan Pendahuluan tersebut diantaranya: RKP tahun 2015 dan Prioritas tahun anggaran 2015 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang proses penyusunannya menunggu visi dan misi presiden terpilih. Hal ini sesuai dengan UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa Presiden yang sedang memerintah diamanatkan untuk menyusun RKP 2015 dengan merujuk kepada arah pembangunan RPJMN ketiga 2015-2019 yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025. Tema RKP tahun 2015 adalah “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”.



Disamping itu, Ketua DPR juga akan menyampaikan inti-sari RUU tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2013 yang sedang dalam proses pembahasan oleh DPR. Akan diangkat pula pandangan fraksi-fraksi mengenai RUU ini.

Perlu diketahui bahwa, pembahasan RAPBN 2015 harus selesai pada tanggal 30 September 2014 (dipercepat satu bulan), karena DPR periode 2009-2014 akan mengakhiri masa tugasnya pada 30 September 2014.

Intisari RUU tentang Kebudayaan

Draft RUU ini terdiri dari 7 bab dan 95 pasal. RUU ini akan segera dibahas pada Masa Sidang I 2014-2015. Dalam penjelasan umum atas RUU ini dikemukakan bahwa :

1. Pasal 32 UUD NRI tahun 1945, menegaskan bahwa “Negera memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Nilai budaya yang dipelihara dan dikembangkan harus didasari pada kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila.
2. Saat ini telah terjadi perubahan tata nilai bangsa Indonesia sebagai akibat dari adanya interaksi antar budaya dalam proses globalisasi, sehingga bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan dibidang kebudayaan. Nilai budaya dan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkan perubahan nilai budaya yang berdampak negatif dalam masyarakat.
3. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai kebudayaan untuk menjadi landasan hukum dan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan, maka perlu di susun UU tentang Kebudayaan. UU ini memuat perspektif pengelolaan kebudayaan yang di dalamnya mengatur mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan pengendalian kebudayaan.
4. Dalam ketentuan umum diatur bahwa yang dimaksud dengan kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya, yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Kebudayaan nasional Indonesia adalah kebudayaan elemen bangsa di seluruh Indonesia dan kebudayaan baru yang timbul akibat interaksi antar kebudayaan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan jati diri dan karakter bangsa.
6. Kebudayaan nasional berasaskan Bhineka Tunggal Ika; Keadaban; Kenusantaraan; Keadilan; Akulturasi; Dan Keberlanjutan.
7. Kebudayaan nasional bertujuan untuk meneguhkan jati diri bangsa; membangun karakter bangsa; memperkuat persatuan bangsa; dan meningkatkan citra bangsa.

RUU tentang Sistem Perbukuan

RUU inisiatif DPR ini terdiri dari XIV Bab dan 94 pasal. Dalam penjelasan RUU ini antara lain dikemukakan bahwa:

1. Salah satu tujuan negara Indonesia seperti ditegaskan dalam pembukaan UUDN RI 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan negara ini dipertegas kembali dalam pasal 31 UUDN RI tahun 45.
2. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun peradaban bangsa, yang dilakukan melalui pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Untuk dapat menjamin terselenggaranya sistem pendidikan nasional yang memadai, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan suatu sistem perbukuan.
3. Buku dapat menjadi salah satu sarana utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUDN RI 1945.
4. Saat ini, perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif, sehingga dibutuhkan pengaturan perbukuan secara sistematis yang mengatur seluruh komponen sistem perbukuan, seperti penulis, penerjemah, penyadur, ilustrator, penyunting, perancang tata letak, pembaca ahli, korektor, penerbit, percetakan dan distributor.
5. Selain komponen-komponen tersebut, UU ini juga mengatur mengenai penulisan naskah buku, penerbitan, pencetakan, pendistribusian, penggunaan, pengadaan, kelembagaan dan peran serta masyarakat.
6. Untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar beberapa ketentuan dalam UU ini.
7. Dalam UU ini yang dimaksud dengan sistem perbukuan adalah tata kelola perbukuan yang saling terkait secara terpadu yang meliputi penulisan naskah, pencetakan, penerbitan, pendistribusian, penggunaan dan pengadaan. Buku adalah karya tulisan dan/atau karya gambar yang dihimpun, berkulit, dan diterbitkan secara tidak berkala, terdiri paling sedikit 48 halaman dan dipublikasikan dalam bentuk cetak dan/atau digital.
8. Buku umum adalah buku yang memuat sumber informasi tentang pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

Komisi V Pantau Kesiapan Bandara Ngurah Rai Sambut Mudik

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dipimpin Laurens Bahang Dama meninjau langsung persiapan Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar Bali dalam menyambut penambahan jumlah penumpang pesawat jelang arus mudik lebaran Tahun 2014 baru-baru ini.

Ketua Tim Kunker Spesifik Laurens Bahang Dama didampingi Mulyadi, Agus Bastian, Nova Iriansyah, Josef A. Nae Soi, Eriko Sotarduga B.P Sitorus, Sudjadi, Yoseph Umarhadi, Chairul Anwar, Yudi Widiana Adia, Hanna Gayatri, Norhasanah, Fary Djemi Francis dan Saleh Husin.

Di sela-sela peninjauan langsung tersebut, Laurens mengingatkan pihak PT. Angkasa Pura I selaku pelaksana otoritas Bandara Ngurah Rai, bahwa Bali sebagai destinasi (tujuan) orang berlibur baik dari turis lokal maupun manca negara agar selalu memperhatikan kualitas pelayanan, apalagi jika jadwal penerbangannya sudah bagus maka akan lebih baik lagi.

“Kita melihat secara utuh bagaimana kesiapan moda transportasi khususnya Bandara sebagai moda transportasi udara yaitu pesawat. Kita mengunjungi Bandara besar karena dalam menghadapi arus mudik lebaran ini pastinya sangat sibuk, jadi tentu kita perlu melihat langsung bagaimana pelayanan terhadap para calon penumpang dan bagaimana pemerintah juga ikut mengawasi,” jelas Laurens.

Politisi PAN dari Dapil NTT tersebut menambahkan jika dirinya percaya kesiapan Bandara Ngurah Rai selaku Bandara Internasional terbiasa dengan jadwal penerbangan yang padat. Namun menghadapi arus mudik ini biasanya ada extra flight (penerbangan tambahan) dan tentu memerlukan tenaga lebih untuk mengantisipasi hal tersebut. Jika pada hari biasa penumpang mencapai 5.000 orang, maka



Tim Kunker Komisi V DPR saat meninjau Bandara Ngurah Rai

diperkirakan pada musim menjelang lebaran akan mendapat tambahan penumpang sekitar 2000 orang.

Menjawab pertanyaan beberapa awak media soal praktek calo tiket, Laurens menjelaskan pihaknya (Komisi V) sudah melakukan rapat dengan Direksi AP I supaya pemerintah juga terlibat aktif mengontrol semua moda transportasi, meliputi koordinasi antara pihak terkait termasuk bagaimana mengontrol soal harga tiket, jangan sampai saat musim ramai seperti sekarang lalu moda transportasi udara memanfaatkan momentum untuk menaikkan harga tiket.

“Soal kenaikan harga tiket pesawat kami melihat masih tergolong wajar, tidak melebihi batas atas seperti yang ditetapkan pemerintah. Menjelang hari raya ini masyarakat mudik sekaligus ingin berlibur sehingga jangan sampai masalah transportasi menjadi beban buat mereka,” pesan Laurens.

Sementara itu Direktur PT Angkasa Pura I, Polana R. Pramesti menegaskan komitmen pihaknya untuk menghilangkan praktek percaloan tiket di Bandara Ngurah Rai. “Kami mengantisipasi ruang gerak percaloan dengan memperketat sistem tiket terpusat (*Center Ticketing System*), sehingga menutup ruang gerak para calo didukung dengan memperketat keamanan bandara,” tegasnya.

Pada peninjauan Bandara Ngurah Rai tersebut, Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR didampingi oleh Kepala Balai Wilayah III Denpasar (BMKG) I Wayan Suardana, Kepala Kantor Otoritas Bandara Kelas I Wilayah IV (Kemenhub) Yuli Sudoso, Kasie Operasi SAR (Basarnas) Wayan Suyatna, Kepala BPJN Wilayah III Ditjen Bina Marga Saiful Anwar dan Humas PT Jasa Marga Dwimawan Heru Santoso. (od). foto: naefuroji/parle/hr

Pertamina Kurang Sosialisasikan BBM Subsidi ke Nelayan

Komisi VII DPR RI meminta Pertamina untuk mensosialisasikan BBM bersubsidi kepada para nelayan di Nusa Tenggara barat (NTB). Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha saat mengunjungi NTB, baru-baru ini.

“Kami berharap Pertamina memperhatikan nelayan-nelayan kecil dan mensosialisasikan bahwa mereka bisa mendapatkan BBM bersubsidi apabila mereka mendapatkan rekomendasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” kata politisi Partai Golkar ini.

Menurut Satya, yang masih menjadi permasalahan adalah nelayan tidak tahu SKPD apa, lalu cara mengurusnya bagaimana. Inilah tugas Pertamina dan BPH Migas untuk menjelaskan kepada nelayan sehingga paham mengenai peraturan meski di daerah terpencil maupun masih buta huruf.

Harapan anggota DPR ini diungkapkan menyusul pejabat Pertamina yang diwakili oleh senior *Vice President Fuel Marketing and Distribution*, Suhartoko bahwa untuk memenuhi kebutuhan para nelayan akibat jumlah Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar khusus Nelayan (SPBN) yang belum memadai.

Terkait masalah ini, solusi yang dilakukan Pertamina adalah nelayan diperbolehkan membeli di SPBU atau lembaga penyalur lain sepanjang ada rekomendasi dari SKPD. Lebih lanjut dia menerangkan bahwa sebenarnya kendala BBM di NTB itu tidak pada alokasi kuota tetapi lebih kepada pasokan dimana bisa terjadi hambatan ketika cuaca angin barat itu muncul.

Dalam kesempatan ini Satya juga mengkritisi pendistribusian aftur untuk pesawat terbang. UU Migas memberikan keleluasan pada pihak asing untuk bisa memasok aftur yang digunakan pesawat terbang di beberapa airport. Sementara banyak *airport* (bandara) sepi penerbangan namun masih



Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha

harus terus disuplai aftur oleh Pertamina, padahal pihak ketiga atau pihak asing tidak melakukan hal yang sama. Hal ini menurut politisi Fraksi Partai Golkar ini sangat tidak menguntungkan Pertamina.

“Maka kita meminta supaya pemerintah harus mengatur dan mengukur airport yang padat dan airport yang kering. Jangan Pertamina terlalu banyak mengerjakan airport yang kering yang kurang menguntungkan. Beri prioritas kepada Pertamina untuk mengelola airport yang padat sementara airport yang ada di wilayah Timur itu bisa diberlakukan dengan kompetisi global atau umum.” tandasnya.

Dengan demikian kata Satya, Pemerintah dan Pertamina harus bisa memanfaatkan dan memperhitungkan keberadaan infrastrukturnya di pelosok Indonesia dalam pemasarannya. Di sisi lain, Pemerintah memperjuangkan Pertamina sebagai pemberi suplai aftur di airport negara lain dengan bekerja sama airport luar negeri sehingga diakui pasar dunia. (Ray) foto: rizka/parle/hr.

Kebutuhan Pokok Lebaran Dipastikan Aman

Kebutuhan bahan pokok untuk menyambut Idul Fitri tahun ini dipastikan aman. Harga-harga bahan pokok pun dinilai stabil, tidak mengalami lonjakan yang meresahkan masyarakat. Setidaknya inilah yang terpantau dari sidak Komisi IV DPR ke beberapa pasar di wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron memastikan kondisi tersebut kepada pers baru-baru ini bersama para anggota Komisi IV lainnya yang meninjau ketersediaan kebutuhan pokok di tiga wilayah. Pasar-pasar yang sempat ditinjau adalah Pasar Caringin Bandung, Pasar Johar Karawang, dan Food Stasion Cipinang Jakarta.

“Hingga saat ini pasokan kebutuhan pokok masih aman. Sesuai dengan UU Pangan No.18 Tahun 2012 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjaga ketahanan pangannya. Pangan sebagai hak asasi manusia harus tersedia dan terjangkau oleh masyarakat,” jelas Herman.

Untuk beras, lanjut Herman, pa-



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron

sokannya dinilai cukup. Tidak ada lonjakan harga atau hambatan dalam

distribusi. Bahkan, untuk beberapa jenis beras harganya sempat mengalami penurunan. Beberapa komoditi lainnya yang terpantau di pasar tradisional, seperti daging mengalami sedikit kenaikan harga.

“Untuk beras sangat cukup tersedia sehingga ada penurunan harga untuk beberapa jenis beras. Harga produk hortikultura dan produk perikanan stabil, yang ada kenaikan di harga daging sapi dan ayam. Kenaikan itu pun disebabkan momentum lebaran, karena stok cukup,” ujar Ketua Departemen Pertanian DPP Partai Demokrat ini.

Yang mengkhawatirkan justru adalah keamanan pangannya itu sendiri. Banyak pedagang mencampur pa-

ngannya dengan bahan pengawet berbahaya. UU Pangan harus ditegakkan kepada para pelanggar aturan pangan. Produsen dan penjual, memang, harus disadarkan tentang bahaya zat pengawet yang bukan untuk pangan.

“Banyak ditemukan jenis pangan olahan yang menggunakan bahan berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, borax, dan pewarna tekstil. Atas temuan ini kami meminta kepada pemerintah untuk menyosialisasikan UU Pangan terkait dengan keamanan pangan. Harus ada pembinaan dan penyadaran yang masif terhadap produsen yang masih menggunakan bahan yang membahayakan kesehatan,” tegas Herman. (mh) foto: naefuroji/parle/hr

DPR Ingatkan BBM Subsidi Tidak Melebihi Kuota

Seiring dengan lonjakan penggunaan kendaraan pada arus mudik dan arus balik lebaran, terjadi peningkatan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Komisi VII DPR meminta kepada Pertamina dan BPH Migas untuk lebih memaksimalkan dalam mengendalikan kebutuhan BBM Bersubsidi.

“Bagaimana cara mengendalikan BBM bersubsidi sehingga tidak over kuota, karena sekarang ini sudah over,” kata Anggota Komisi VII Ali Kastella dari Fraksi Partai Hanura, setelah mendapatkan penjelasan tentang sistem dan cara distribusi BBM dalam rangka menghadapi lebaran oleh PT. Pertamina yang dihadiri juga pihak BPH Migas, Minggu (20/7), di Terminal BBM Padalarang, Jawa Barat.

Menurut Ali Kastella pengendalian BBM bersubsidi tidak berjalan dengan baik. “Misi BPH Migas adalah pengendalian BBM bersubsidi sehingga tidak membengkak terus. Saya pikir pengendalian BBM bersubsidi tidak dijalankan dengan baik,” kritiknya.

Wakil Ketua Komisi VII Achmad Farial dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menambahkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) total volume BBM Bersubsidi sebanyak 48 juta kl diturunkan menjadi 46 juta kl.

“Saya minta BPH Migas mengontrol bagaimana penetapan volume 46 juta kl di APBN-P 2014 ini tidak seperti tahun lalu dengan minta tambahan lagi. Pertamina juga harus lebih bisa mengendalikan BBM dari kebocoran-kebocoran yang ada,” tegasnya.

Achmad Farial juga mengusulkan kendaraan pengguna



Tim Komisi VII DPR mengadakan pertemuan dengan PT Pertamina dan BPH Migas

jalan tol jangan dikasih premium (BBM bersubsidi). Karena kalau yang mudik menggunakan kendaraan mobil berarti bisa dikategorikan mampu. jadi buat apa dikasih premium.

Anggota Komite BPH Migas Qoyum Tjandranegara menjelaskan bahwa telah diputuskan oleh pemerintah termasuk dengan DPR bahwa mulai 1 Juli sampai akhir Desember 2014 BBM bersubsidi diturunkan dari 48 juta kl menjadi 46 juta kl.

“Sampai akhir Juni yang telah dikonsumsi sebanyak 22,9 juta kl, jadi kalau ini per semester 23 juta kl, saya memperkirakan pas jumlahnya. Jadi belum melebihi,” jelasnya.

Meski demikian diingatkan, selagi masih adanya dispari-

tas harga BBM yang masih jauh maka penyelewengan BBM masih tetap tinggi.

Lebih lanjut, menurutnya kendaraan mobil plat hitam

harus menggunakan pertamax karena bukan 30% dinikmati oleh lapisan masyarakat menengah ke bawah tapi hanya 4%. Sebanyak 96% BBM dinikmati oleh kalangan masyarakat kelas menengah ke atas,” tegas Qoyum. (as) foto: as/parle/hr.

Ketersediaan BBM Jadi Perhatian Komisi VII DPR

Wakil Ketua Komisi VII DPR Daryatmo Mardiyanto mengatakan, Kunjungan Kerja Spesifik ke Semarang, Jawa Tengah dalam rangka mengawasi dan meninjau langsung kondisi penyediaan dan distribusi BBM dan gas untuk masyarakat khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Komisi VII DPR menurunkan empat delegasi ke Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk meninjau langsung kondisi stok dan distribusi BBM untuk masyarakat,” jelasnya baru-baru ini kepada Parlemen.

Dia mengatakan, momentum hari raya dan liburan selalu dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk mudik ke kampung halaman, hal tersebut sudah merupakan adat istiadat masyarakat Indonesia. Karena itu, ketersediaan BBM yang cukup saat mudik menjadi prioritas Komisi VII DPR untuk mengawalinya. “Itu yang menjadi perhatian Komisi VII DPR, selain itu juga, Jateng termasuk jalur utama yang dilalui masyarakat yang ingin ke Jatim, jadi mobilitas masyarakat sangat tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, mobilitas masyarakat yang tinggi itu memerlukan kesiapan fasilitas dan sarana serta kesiapan ketika melonjaknya permintaan BBM. “Jika tidak diimbangi pasokan yang cukup akan menjadi keresahan masyarakat. Komisi VII yang punya mitra tugas dengan Pertamina memberikan perhatian khusus untuk mengantisipasi distribusi tersebut,” terangnya.

Dia menambahkan, tujuan Kunker spesifik ke Semarang yaitu ingin memperoleh masukan dan langkah antisipasi



Tim Kunker Komisi VII ke Semarang Jateng

menjelang Hari Raya Idul Fitri. “Kita ingin meminta masukan komprehensif seperti pasokan kesediaan BBM, fasilitas infrastruktur BBM, termasuk depo dan terminal BBM, SDM untuk antisipasi kerawanan. Antisipasi dan penanganan secara cepat jika terjadi masalah distribusi BBM,” terangnya.

Komisi VII DPR, lanjutnya, juga memberikan perhatian terhadap SPBU di sekitar Pantura. Pasalnya, selain menyediakan BBM, harus diperhatikan juga fasilitas yang layak untuk para pemudik beristirahat. “Kita mengharapkan dapat memperoleh informasi yang cukup jika ada masalah kita selesaikan bersama,” katanya.

Selain itu, kata Daryatmo, kunker ini menjalankan fungsi pengawasan Dewan yang bertujuan mencocokkan data dilapangan dengan kebijakannya apakah cukup memadai atau tidak. (si) foto:sugeng/parle/hr.



Petani Harus Mampu Produksi Pupuk Sendiri

Pupuk untuk pertanian kerap langka dan mahal. Para petani kesulitan mendapatkan pupuk ketika musim tanam mulai tiba. Selama ini petani dibuat ketergantungan dengan pupuk organik bersubsidi dari pemerintah.

“Mengapa kita tidak membina petani untuk bisa membuat pupuk sendiri di desanya dari kotoran sapi.” Demikian disampaikan Anggota Ko-

misi IV DPR RI Siswono Yudo Husodo (F-PG), Rabu (23/7). Penyuplai pupuk organik selama ini adalah perusahaan-perusahaan BUMN besar. Petani harus mandiri. Jangan semuanya dari pemerintah, baik benih maupun pupuknya. Padahal, anggaran untuk pupuk bersubsidi sangat besar, mencapai Rp20 triliun pada 2014 ini.

Dengan membuat pupuk organik

sendiri, tidak ada lagi biaya distribusi pupuk ke berbagai daerah. Ini merupakan penghematan besar. Di Tiongkok, pabrik pupuk berdiri di tengah desa, sehingga menghemat biaya transpor untuk distribusinya. “Di Indonesia, pupuk Sriwijaya di buat

di Sumatera, kemudian dibawa ke Papua. Ongkos angkutnya lebih mahal daripada harga barangnya sendiri,” ungkap Siswono.

Dulu, di tahun 1950-an, sambung Siswono, para petani membuat pupuk

sendiri dari kotoran ternak. Ketika teknologi traktor menggantikan tenaga kerbau dan sapi untuk membajak sawah, banyak ternaknya itu yang dijual, sehingga tidak ada lagi kotoran hewani sebagai bahan baku pupuk organik. (mh) foto: naefuroji/parle/hr

Kementan Terlalu Optimis dengan Programnya

Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rilisnya menyatakan, 3,5 bulan ke depan produksi padi akan bertambah lagi sebesar 22,8 juta ton gabah kering giling (GKG) dari luas tanam 4,43 juta hektar dengan produktivitas 5,16 ton per hektar. Proyeksi ini dinilai terlalu optimistis, karena Kementan sering kali meleset dengan targetnya tersebut.

Penilaian tersebut dikemukakan Anggota Komisi IV DPR Siswono Yudo Husodo (F-PG) Rabu (23/7). “Selama ini Kementan itu cenderung terlalu optimistis. Kita bisa menyebut di awal Kabinet Indonesia Bersatu, Menteri Pertanian mencanangkan swasembada daging 2015. Selain itu juga swasembada kedelai dan swasembada gula. Optimis sekali. Sekarang saja 2014 masih impor. Tidak mungkin dalam sisa waktu ini kita bisa swasembada,” tandas Siswono.

Siswono mengungkapkan, kedelai saja saat ini masih impor sebesar 75%.



Anggota Komisi IV DPR Siswono Yudo Husodo

Bagaimana kita bisa merencanakan swasembada bila terus menerus impor. Bila sekarang produksi beras cukup, itu memang betul, tapi jumlahnya perlu direview kembali. Proyeksi bahwa ada peningkatan padi, itu perlu dilihat kembali, lantaran saat ini di setiap daerah berbeda-beda aktivitas pertaniannya. Mestinya sekarang musim panas, tapi hujan masih kerap turun. Di sebagian daerah, Juli ini ada yang mulai tander. Mestinya tidak ada

tander.

“Jujur saya mengatakan Kementerian Pertanian sudah terlalu optimistis,” nilai politisi Golkar tersebut. Dalam setiap rapat dengan Komisi IV, memang sering ditanyakan mengenai optimisme itu. Misalnya, Mentan menyampaikan mau swasembada beras. Tapi, realisasinya tidak ada. “Perlu dicatat, anggaran pengadaan beras itu terlalu besar dalam APBN. Kementan terlalu memfokuskan anggaran untuk beras. Harusnya berpikir untuk semua aspek, seperti daging, jagung, sayur mayur, dan lain-lain.”

Neraca perdagangan, lanjut Siswono, mengalami defisit yang berarti impor pangan jauh lebih tinggi daripada ekspornya. Di sektor pertanian, neraca perdagangan yang bekerja surplus hanya di produk perkebunan. Ini bisa dilihat dari nilai ekspor kelapa sawit, karet, teh, dan kopi yang sangat bagus. (mh) foto: naefurodjie/parle/hr.

Penerbangan Internasional Harus Hindari Daerah Konflik

Musibah jatuhnya pesawat milik Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH17 di Ukraina harus menjadi pembelajaran bagi seluruh maskapai di dunia. Pasalnya, ada beberapa daerah yang tercatat sebagai daerah konflik, sehingga perlu dihindari terbang di atas wilayah tersebut.

“Kejadian jatuhnya pesawat MH17 ini menjadi pembelajaran. Saya kira sudah diingatkan juga penerbangan nasional yang melaju untuk menghindari

wilayah-wilayah konflik, seperti Suriah, Gaza, atau Afghanistan. Wilayah konflik sebaiknya kita hindari, jangan sampai terjadi kasus seperti ini yang menimbulkan korban sipil yang tidak kita inginkan,” harap Ketua DPR RI Marzuki Alie, usai berbuka puasa dengan segenap rekan kerja di Komplek Widya Chandra, Senin (21/07).

Ia menilai, kejadian tertembaknya pesawat Boeing 777 ini karena ada faktor miss. Sebenarnya, tidak ada niatan



Ketua DPR RI Marzuki Alie

untuk menembak pesawat komersial, namun ternyata malah menembak pesawat yang melintas di atas daerah konflik tersebut.

“Miss itu bisa terjadi. Oleh karena itu, lebih baik menghindari konflik, khususnya penerbangan komersial. Berikutnya, tentu ini harus diinvestigasi. Siapa pun yang bersalah, harus diselesaikan sesuai hukum internasional,” tegas Marzuki.

Politisi Demokrat ini menyatakan, menembak pesawat komersial apapun alasannya itu tidak dibenarkan menu-

rut hukum internasional. Oleh karena itu, kasus ini harus diselesaikan, dan jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari.

“Investigasi harus dilakukan secara transparan, terbuka, sehingga ada fakta-fakta yang juga harus kita terima nantinya kalau itu ada kesalahan dan sebagainya. Indonesia akan jadi bagian investigasi karena ada warga negara Indonesia yang menjadi korban,” tambahna.

la yakin, semua negara sudah bereaksi terhadap musibah ini, termasuk PBB.

“Saya kira semua negara langsung bereaksi, karena ini sungguh memprihatinkan kita, karena pelanggaran terhadap hukum internasional,” tutup Marzuki.

Sebagaimana diketahui, pesawat terbang milik Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH17, meninggalkan Amsterdam, Belanda pada pukul 12.14 waktu setempat atau kira-kira pukul 19.14 WIB. Pesawat yang tengah menjalani rute dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur, dan mengangkut 295 orang, jatuh di dekat perbatasan Ukraina dan Rusia. (sf) foto: naefuroji/parle/hr

Pemprov Jatim Lebih Banyak Berikan layanan Mudik Gratis

Dibanding dengan Provinsi lain, Pemerintah Propinsi (Pemprov) Jawa Timur adalah satu-satunya propinsi yang terbanyak memberikan angkutan gratis. Jika di tempat lain, hanya ada angkutan darat gratis, di Jawa Timur Pemprov setempat memberi pelayanan gratis bagi pemudik dengan bus, kereta api dan kapal laut.

Hal itu terungkap saat Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi Michael Wattimena menggelar pertemuan dengan jajaran Dinas Perhubungan, Kepolisian dan Basarnas serta BMKG Jawa Timur guna memantau persiapan angkutan mudik dan balik lebaran 2014 baru-baru ini di Surabaya.

Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jatim Wahid Wahyudi, pada lebaran Idul Fitri tahun 2014 ini sebanyak 131.000 orang diberi fasilitas mudik dan balik gratis. Pemda Jatim sendiri menyediakan 440 armada bus, dari perusahaan penerbit Radar menyediakan 50 bus, Jasa Rahardja 50 bus dan Pemkab Sidoarjo serta Honda menyediakan beberapa armada bus.

Menurut Wahyudi, Pemprov Jatim juga menyediakan angkutan laut gratis dengan menyiapkan 3 buah kapal diantaranya ke pulau-pulau Bawean dan Kangean sebanyak 32 trip. Mudik gratis juga disiapkan bagi penumpang kereta api antara lain rute Surabaya-Malang, Surabaya-Banyuwangi dan kota lain yang berbatasan dengan Jawa Tengah.

Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga menyediakan sejumlah kendaraan gratis untuk mengangkut sepeda motor. Sebanyak 650 unit sepeda motor akan diangkut gratis sementara pemiliknya diangkut dengan bus sampai kampung halamannya. Kepedulian Pemprov Jatim juga diberikan terhadap pemudik ibu hamil dan ibu menyusui dengan disediakan bus khusus.

“Alhamdulillah bus khusus ini banyak diminati, setelah dibuka pendaftaran sehari telah terpenuhi sebanyak 45.000 orang. Mudik ini juga dapat mengurangi kepadatan penumpang di terminal sehingga berdampak kepada kelancaran lalu lintas,” kata Wahid Wahyudi.



Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena

Komisi V DPR menghargai langkah-langkah Pemprov Jatim yang memberikan pelayanan mudik gratis ini. Menurut Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena, disbanding Propinsi lain, Jatim dalam pelayanan mudik gratis lebih unggul dan ini sangat membantu masyarakat merayakan lebaran. (mp).

foto: mastur prantono/parle/hr

Jalin Silaturahmi Melalui Buka Bersama

Menjalin silaturahmi dapat membangun hubungan dan kebersamaan yang lebih baik. Demikian diucapkan oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie, saat acara buka bersama di rumah dinas, di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Senin (21/07).

Hadir dalam kesempatan ini segenap pimpinan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Tenaga Pembangunan Sriwijaya, Surya Madani, dan beberapa kader sekaligus Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat.

“Sebagai Ketua DPR, tentu harus menampung semua aspirasi. Aspirasinya datang dari semua elemen masyarakat. Mudah-mudahan dengan sering bersilaturahmi, akan terbangun hubungan yang baik, dan ada kebersamaan yang lebih baik,” kata Marzuki.

Dalam sambutannya, Politisi Partai Demokrat ini menyatakan, kondisi Indonesia yang baru saja menyelesaikan pemilu presiden, situasi politik sedang tinggi. Namun dalam bulan puasa ini, situasi harus tetap kondusif, aman dan damai, siapapun nanti yang terpilih.

“Tugas kita adalah bagaimana mengawal pemerintahan ke depan sehingga mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik. Partai tentu mempunyai peran yang lebih besar dalam mengawal pemerintahan ke depan, elemen masyarakat juga dapat memberikan masukan-masukan positif bagi pembangunan Indonesia. Saya kira kita perlu sharing berpikir bersama bagaimana mengawal pemerintahan ke depan menjadi lebih baik dari pemerintahan yang sekarang ini,” harap Marzuki.

Masih dalam kesempatan yang sama, pada 2015 mendatang, tambah Marzuki, Indonesia akan memasuki era dimana ASEAN akan menjadi satu yaitu masyarakat ASEAN Economic Community 2015. Di era ini, tentunya Sumber Daya Manusia menjadi penting, sehingga harus disiapkan secepat mungkin.

“Di era AEC Tidak ada batas di antara negara Asia. Tentunya SDM menjadi hal yang sangat penting yang harus kita sikapi dan siapkan. Seharusnya sudah dari lama kita



Ketua DPR RI Marzuki Ali

siapkan, sehingga 2015 nanti tidak hanya negara-negara ASEAN yang mampu membanjiri Indonesia, tetapi juga budaya Indonesia yang mampu mengisi ruang-ruang kerja di negara-negara Asian lainnya,” imbuh Politisi berdarah Sumatera Selatan ini.

Dengan dimulainya era AEC ini, diharapkan dapat menjadi motivasi Indonesia untuk meningkatkan produksi, sehingga mampu bersaing dengan produk negara-negara Asia. Sehingga, Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi negara-negara Asia, tapi juga mampu memanfaatkan pasar di negara-negara Asian.

“Namun apabila kita tidak mampu memanfaatkan dan menyiapkannya dengan baik, kita hanya bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri,” kata Marzuki mengakhiri pidatonya. (sf) foto: naefuroji/parle/hr

Komisi VII Pantau Stok BBM di Jatim



Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR Zainudin Amali saat pertemuan dengan PT. Pertamina dan BPH. Migas

Menjelang berakhirnya ibadah puasa di bulan suci Ramadhan 2014, masyarakat khususnya kaum urban yang berdiam di kota-kota besar di Indonesia, melakukan migrasi (mudik) sementara ke daerah asal mereka. “Fenomena ini telah menjadi adat kebiasaan yang telah dilakukan oleh mereka selama bertahun-tahun,” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Zainudin Amali (F-PG)

saat pertemuan dengan PT. Pertamina (Persero) khususnya Pertamina Marketing Operation Region V (MOR V) dan BPH Migas Surabaya, Senin (21/7).

Menurutnya, peningkatan aktivitas masyarakat di bulan puasa biasanya mulai terasa 15 hari sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 2014 (1435 H). Kondisi ini mengakibatkan permintaan akan energi khususnya Premium dan LPG 3 Kg bersubsidi mulai merangkak naik hingga mencapai kisaran 50 persen dari kebutuhan normal harian.

Oleh karena itu, Komisi VII yang bermitra dengan Kementerian ESDM termasuk di dalamnya PT. Pertamina (Persero) bagian MOR V

Surabaya yang membawahi daerah Jawa Timur dapat meningkatkan efektivitas koordinasi antara manajemen PT. Pertamina (Persero) khususnya MOR V dengan pihak berwajib, Kementerian ESDM, Pemda dan Dinas Perhubungan (DLLAJ) serta instansi terkait lainnya untuk menghindari penyalahgunaan distribusi BBM dan LPG 3 Kg.

Selain itu, Komisi VII juga ingin memastikan jumlah stok dan supply BBM khususnya Premium dan LPG 3 Kg bersubsidi telah mencukupi kebutuhan konsumen hingga disemua



lini masyarakat sehingga potensi terjadinya kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg bisa diminimalkan.

Sementara General Manager Pertamina Operating Region V, Giri Santoso merasa bangga dengan kehadiran Komisi VII DPR yang menunjukkan perhatian besar terhadap PT. Pertamina (Persero) khususnya MOR V.

Terkait dengan BBM khususnya Premium, Giri mengatakan tren konsumsi premium terus naik sekitar 6 persen. Tetapi pada tahun 2014 ini sementara pakai kuota, sehingga tidak lebih besar dari pada tahun 2013. Begitu juga dengan LPG terus naik, terutama yang 3 Kg walaupun di Jawa Timur

masih banyak juga yang menggunakan Minyak Tanah, konsumsinya rata-rata sekitar 11 persen kenaikannya, sedangkan LPG 12 Kg cenderung menurun.

Mengenai kesiapan lebaran, pihaknya sudah membentuk Tim Satgas mulai tanggal 1 Juli sampai 12 Agustus 2014 dan petugasnya tidak boleh ada yang cuti dan tidak boleh meninggalkan tempat. Begitu juga dengan supply, dimonitor terus stoknya, dan kebutuhan armada mobil tangki disiapkan dan apabila nanti ada kemacetan, ditambah pengaturan operasional untuk buka selama 24 jam, ujarnya.

(iw)/foto:iwan armanias/parle

Segera Tutup Perlintasan KA Liar

Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo mendesak KAI untuk segera menutup palang pintu liar perlintasan kereta api. Langkah tegas ini harus dilakukan sesuai amanat UU LLAJ tahun 2011 dimana tidak boleh ada lagi palang pintu sebidang. "Ini tidak boleh, karena melanggar UU dan memberi waktu 3 tahun sejak 2011, seharusnya tahun ini sudah tidak ada lagi perlintasan KA sebidang," katanya saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi V ke Jatim pekan lalu.

"Kalau semua lintasan atas inisiatif nama pribadi atau masyarakat ditolelir, maka perlintasan liar akan terus bertambah. Segera semua pelintasan liar harus ditutup," katanya. Amanat UU juga menegaskan bahwa pelintasan sebidang tidak boleh lagi, harus dibangun *under pass* atau *fly over*.

Tim Komisi V dalam kesempatan ini mendapatkan informasi bahwa sebanyak 880 perlintasan kereta api di Jawa Timur belum berpalang pintu. Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jawa Timur Wahid Wahyudi mengatakan akan menerjunkan petugas untuk mengawasi perlintasan tersebut. "Sebanyak 880 perlintasan itu memang belum ada apa-apanya," katanya.

Menurutnya, perlintasan sebidang di Jawa Timur ada 1.400. Dari jumlah itu, 350 di antaranya sudah berpalang pintu. Sedangkan 170 perlintasan telah dipasang *early warning system*. Sistem itu bekerja 1 kilometer sebelum kereta api melewati perlintasan. Lampu merah akan menyala dan ada suara audio yang menginformasikan bahwa kereta akan melintas.



Pimpinan Tim Kunker Komisi V DPR Sigit Sosiantomo (kiri)

Sigit menambahkan, perlintasan liar banyak muncul karena banyak hunian yang tumbuh di sekitar jalur kereta api. "Kami minta pemerintah menegakkan *law enforcement*, sebab kalau dibiarkan terus akan banyak terjadi kecelakaan yang memakan korban," tegasnya.

Terakhir terjadinya kecelakaan di Surabaya di palang pintu KA karena petugas tidak ditempatkan dan digantikan bukan oleh pegawai KA. Masalah-masalah seperti ini supaya dikoordinasikan sebab fasilitas dari pusat sudah disediakan luar biasa tinggal pemda memanfaatkan sebaik-baiknya.

Diingatkan Sigit, masyarakat supaya lebih hati-hati karena frekuensi perjalanan KA akan meningkat apalagi dengan dibuka jalur ganda (*double track*). Tahun depan diharapkan sudah tidak ada lagi pelintasan sebidang, jangan lagi menambah pelintasan-pelintasan atas nama pribadi. (mp) foto: mastur prantono/parle/hr

Komisi VII Ingin Pastikan Ketersediaan BBM Terjaga

Komisi VII DPR RI ingin memastikan kesiapan Pertamina dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1435 H terhadap kebutuhan masyarakat akan Bahan Bakar Minyak (BBM). Untuk itu, Komisi yang membidangi Energi ini melakukan

kunjungan spesifik di Region III Terminal BBM Padalarang.

Wakil Ketua Komisi VII Ahmad Farihal mengatakan, kunjungan ini merupakan bagian pelaksanaan fungsi penga-

wasan dan menyerap aspirasi serta mendapatkan informasi tentang perkembangan dan permasalahan terkait penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan elpiji 3 kg oleh Pertamina menjelang hari raya Idul Fitri.

“Bahan bakar minyak dan gas merupakan komoditi yang sangat vital bagi masyarakat, sehingga ketersediaannya harus selalu terjaga” kata Ahmad Fariat, Minggu (20/7).

Menurutnya, selain upaya menjaga ketersediaan pasokan, aspek lain juga harus diperhatikan adalah penguatan infrastruktur untuk kelancaran pendistribusian apalagi menjelang dan pada bulan ini menyambut hari raya Idul Fitri biasanya kebutuhan bahan bakar minyak akan melonjak sangat besar. Mobilitas masyarakat tinggi sehingga perlu kesiapan dan terjamin ketersediaannya.

”Komisi VII mengharapkan seluruh ketersediaan dan pendistribusian bahan bakar yang menjadi tanggung jawab Pertamina dapat teratasi dengan baik, sehingga masalah kelangkaan bahan bakar dan kesulitan masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar minyak serta penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi tidak terjadi,” tegasnya.

General Manager Marketing Operation Region III Afandi menjelaskan kesiapan Pertamina dalam menghadapi mudik lebaran. Wilayah kerja pemasaran Pertamina di seluruh Indonesia terbagi dalam 8 region, dengan 112 terminal BBM dan 4879 SPBU, 54 DPPU, 97 instalasi pelabuhan, 3 LOBP (Lubricant Oil Blending Plants) dan 151 Kapal Tanker.

Region III (wilayah operasi pemasaran Provinsi DKI, Banten, dan Jawa Barat) memiliki stok premium 372.763 kl (16 hari), solar 504.515 kl (40 hari), pertamax 100.416 kl (85 hari), pertamax plus 36.176 kl (241 hari), kerosene 57.824 kl (588 hari), DEX 9.985 (243 hari), MDF 43.633 kl (533 hari), MFO 54.045 (102 hari), MFO380 stok 9.286 (33 hari), dan Bio Fame 21.558 (51 hari).

Obyek kunjungan spesifik di region III khususnya wilayah kerja Bandung Group TBBM Padalarang dan TBBM Ujung Berung (Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Subang, Purwakarta, Sumedang, Garut), BBM disuplai menggunakan pipa dari kilang Cilacap.

TBBM Padalarang mempunyai stok yang cukup untuk premium 26.495 kl (9 hari), biosolar 17.074 kl (14 hari), Kerosine 11.215 kl (70 hari). Dan TBBM Ujung Berung mempunyai stok untuk premium 45.206 kl (9 hari), bio solar 22.704 kl (14 hari), pertamax 5.961 kl (17 hari).



Tim Kunker Komisi VII DPR memantau kesiapan BBM di Dago, Bandung

Kemasan Literan

Untuk mengatasi luapan manusia di SPBU akibat antrian untuk mengisi bahan bakar, Pertamina sudah mulai memasarkan bahan bakar kendaraan dalam kemasan (1ltr, 2ltr, 5ltr, 10ltr).

Daya angkut yang dimiliki masih sangat cukup untuk melayani peningkatan kebutuhan BBM. Untuk menghindari kemacetan dan keterlambatan suplai maka berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun lalu Pertamina membuat SPBU kantong, ini artinya mobil tangki *standby* di 18 SPBU dimana setiap saat dapat digerakan kepada SPBU terdekat yang mengalami krisis stok.

Berdasarkan pengalaman ini tersebar di jalur selatan dan jalur utara, sehingga ketika ada krisis stok karena macet, dipindahkan dari SPBU terdekat. ini upaya agar tidak ikut terkendala karena macet.

Buffer stock untuk 21 SPBU yang kapasitas tangkinya terbatas atau peningkatan penjualannya diperkirakan sangat tinggi. Rata-rata SPBU mempunyai kapasitas 30-60 ton sedangkan peningkatan penjualan diperkirakan diatas 60 ton.

“Baru tahun ini dilakukan Pertamina, karena sepeda motor di jalur utara akan dialihkan ke jalur alternatif yang tidak lazim. Sepeda motor akan dibelokkan mulai dari Karawang ke kiri arah pinggir laut nantinya tembus lewat dari Cikampek. Pertamina menyiapkan kios pertamax 1 liter dengan kemasan kaleng, supaya di tengah jalan mereka kehabisan bisa menggunakan ini,” paparnya. (as) foto: agung sulistiono/parle/hr

DPR Apresiasi Kesiapan Pemerintah Tangani Angkutan Mudik di Jatim

Komisi V DPR mengapresiasi kesiapan aparat terkait di Jawa Timur dalam menangani angkutan lebaran yang dimulai Senin 21 Juli hingga 5 Agustus 2014. “Saya menyampaikan apresiasi

kepada segenap jajaran pemerintah terkait di Jawa Timur mempersiapkan pelayanan dan pengamanan angkutan mudik dan balik lebaran tahun 2014 dengan cukup baik,” tandas Wakil Ketua

Komisi V DPR Michael Wattimena saat menggelar pertemuan dengan jajaran terkait angkutan lebaran 2014 Propinsi Jawa Timur di Ruang Rapat Bandara Juanda Surabaya, baru-baru ini.



Tim Kunker Spesifik Komisi V meninjau Stasiun KA Pasar Turi

Tim Kunker Spesifik Komisi V adalah Michael Wattimena dari FPD selaku Ketua Tim, didampingi Agung Budi Santoso, Umar Arsal, Bahrum Daido dan Saan Moestopa dari FPD, Gandung Pardiman dan Ibnu Munzir dari FPG, Sadarestuwati dan Rendhy Lamadjido dari FPDI Perjuangan dan Sigit Sosiantomo (FPKS) serta Imam Nahravi dari FPKB.

Manajer Operasi Angkasa Pura I Syahrani menjelaskan estimasi puncak kepadatan penumpang terjadi Jum'at dan Sabtu (25-26/7) sedang arus balik pada Minggu dan Senin (3-4/8) dengan perkiraan penumpang pada puncak kepadatan sebanyak 56-57 ribu penumpang/hari, sementara penumpang internasional sebanyak 6-7 ribu orang. Sementara estimasi kenaikan extra flight 2014 sebesar 12% dengan total

domestik sebanyak 198 flight dan internasional sebanyak 67 flight.

Kadishub Jatim Wahid Wahyudi menjelaskan soal kesiapan jalan raya di wilayah ini yang sudah disiapkan menjelang lebaran ini. Dia menyampaikan motto "tiada hari tanpa tambal jalan" sehingga di wilayah Jawa Timur tidak ada jalan bergelombang, yang ada jalan bergelombang. Tim Komisi V juga menerima penjelasan dari kesiapan dari aparat BKMG dan Basarnas dalam mengantisipasi langkah-langkah untuk melayani masyarakat berlebaran.

Selain menggelar pertemuan dengan instansi terkait, Tim Kunker Komisi V juga mengunjungi dan berdialog dengan pejabat Pelabuhan Tanjung Perak, mengunjungi dan berdialog pejabat PT KAI Pasar Turi dan meninjau Terminal

Purbaya Bungurasih. Di sejumlah tempat telah didirikan posko, bahkan ada fasilitas untuk ibu menyusui, penambahan petugas keamanan dalam rangka memberikan pelayanan kepada rakyat sebaik-baiknya.

Anggota Tim Sigit Sosiantomo menyatakan, rupanya pemerintah pusat telah memberi perhatian yang cukup besar kepada Pemda Jatim dengan dibangunnya pelabuhan Tanjung Perak. "Pelabuhan yang rencananya akan diresmikan pada HUT RI 17 Agustus nanti sudah sangat bagus. Mungkin Singapura kalah, pelabuhannya tidak semewah ini," ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, bandar udara Juanda yang rencananya ada triple runway, ini luar biasa sementara terminal Purbaya dinilai sebagai tercantik di Indonesia, dan kalau pembangunannya sudah selesai akan menjadi terbaik di Indonesia. "Ini kepercayaan negara kepada Pemda Jatim, diharapkan kepercayaan ini diterima dengan koordinasi yang baik antar departemen dan lembaga yang ada di pusat, provinsi maupun kota sehingga dapat dinikmati seluruh masyarakat Jatim," katanya.

Namun dia menyayangkan masih ada bus-bus antar kota yang mengangkut penumpang langsung dari garasinya, bukan ke terminal lebih dulu. "Kejadian seperti ini tidak boleh, karena terminal bus menjadi sepi penumpang padahal Pemda telah mengeluarkan biaya besar Rp 84 miliar. Mohon ada penertiban dan hukum harus ditegakkan," kata Sigit menambahkan. (mp). foto: mastur prantono/parle/hr

Komisi VIII Terkejut Pantai Lampu Satu Alami Abrasi Terbesar

Rombongan Tim rombongan Komisi VIII DPR mengaku kaget dan terkejut karena tingginya abrasi di Pantai Lampu Satu Merauke, bahkan disinyalir abrasi terbesar di Indonesia.

"Tujuan kita juga ingin melakukan pemantauan secara langsung ke Pantai Lampu Satu karena berdasarkan laporan telah terjadi abrasi terbesar di Indonesia, yang sering menjadi

permasalahan dan keluhan dari waktu ke waktu bagi warga setempat yang notabenehnya adalah nelayan," ujar ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah saat meninjau langsung ke Pantai Lampu Satu Merauke Papua, baru-baru ini.

Ledia Hanifa Amaliah menambahkan, Komisi VIII DPR mendapat laporan adanya abrasi dari Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke. "Karena itu kita bersama rombongan meninjau langsung ke pantai Lampu Satu tersebut, dan meninjau beberapa titik di pantai Lampu Satu yang sering menjadi langganan abrasi.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, bahwa DPR memiliki tugas dan tanggung jawab serta memonitoring berbagai

permasalahan yang dihadapi dan dirasakan masyarakat. “Ya salah satunya adalah menyangkut abrasi pantai yang dikeluhkan ini,” tegasnya.

Politisi PKS Ledia Hanifa Amaliah mengemukakan, perlu dipikirkan bersama untuk menanggulangi persoalan abrasi tersebut dengan dukungan dana dari Pusat, pasalnya anggaran APBD tidak mencukupi. “Kita ini negara kepulauan, kasus abrasi itu ada dimana-mana namun abrasi terbesar adanya di pantai Lampu Satu Merauke,” ujar Ledia.

Dia mengatakan, melihat kondisi riil yang terjadi Pantai Lampu Satu Merauke, tim akan membawa persoalan ini ke pusat dan berdiskusi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Karena institusi tersebut memiliki kewenangan termasuk dari sisi penganggaran, kita akan bicarakan agar tim bisa datang ke Merauke, sekaligus melakukan survey terlebih dahulu dan melihat kondisi yang sebenarnya,” paparnya.

Dikatakan juga, kondisi ini sudah



Tim Komisi VIII DPR saat meninjau Pantai Lampu Satu Merauke

darurat karena itu harus segera diambil langkah cepat dan tepat sehingga abrasi di pantai tersebut tidak terjadi di waktu mendatang.

“Dengan pemantauan langsung yang dilakukan Komisi VIII DPR, tentu menjadi bahan untuk diperjuangkan di

institusi terkait. Selain itu, tugas lain yang dilaksanakan adalah memantau berbagai kegiatan-kegiatan pembangunan dengan menggunakan dana dari tingkat pusat selama ini, artinya apakah sudah dimanfaatkan sesuai dengan sasaran atau tidak. (spy). foto: [suprianto/parle/hr](#).

Pentingnya Persiapan Sarana dan Prasarana Transportasi Jelang Arus Mudik



Tim Kunker Komisi V DPR saat pertemuan dengan PT Angkasa Pura II

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Laurens Bahang Dama menekankan pentingnya persiapan sarana dan prasarana transportasi baik udara, darat dan laut menjelang arus mudik lebaran Tahun 2014. Hal tersebut mengemuka saat Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR RI mengunjungi Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng sesaat sebelum bertolak ke Bali baru-baru ini.

Laurens, yang juga politisi PAN tersebut juga meminta PT. Angkasa Pura II selaku otoritas bandara agar tidak menaikkan tarif pesawat udara secara sepihak. Karena itu perlu koordinasi dengan semua *stake holder* (pemangku kepentingan) di Bandara sehingga tidak memberatkan masyarakat. “Tidak boleh ada maskapai yang menaikkan harga melebihi batas atas. Jika dilanggar, tugas pemerintah yang memberikan sanksi dengan melalui tahapan, mulai dari teguran tertulis hingga ancaman pencabutan ijin operasi,” jelas Laurens.

Sementara itu, Rendy Lamadjido dari Fraksi PDI-P menyoroti belum maksimalnya pelayanan di Bandara Soekarno Hatta. Hal tersebut terlihat dengan masih seringnya terjadi penumpukan antrian saat penumpang melakukan *boarding*. “Saya melihat langsung kejadian tersebut, terutama pada saat penerbangan pertama pagi hari, saat ratusan penumpang hendak *boarding* ternyata pintu masuk yang dibuka hanya satu, padahal saya lihat total ada tiga pintu tersedia, ketika saya tanya ke petugas mereka hanya menjawab karena keterbatasan petugas yang jaga,” ungkap Rendy.

Di lain pihak, Anggota Komisi V DPR RI Nova Iriansyah dari Partai Demokrat, mengeluhkan buruknya pelayanan di Bandara Kualanamu Medan. Ia mengaku melihat langsung maraknya praktek calo tiket. Lemahnya pengawasan

serta sistem keamanan yang tergolong longgar terhadap pengunjung bandara, dimanfaatkan oknum-oknum untuk menjalankan praktek percaloan tiket. “Harga tiket resmi dengan yang dijual calo tersebut bisa selisih sekira Rp 300 ribu,” ujar Nova.

Hal tersebut tentu sangat mengganggu kenyamanan calon penumpang. Untuk memenuhi rasa ingin tahu perihal percaloan, Nova pun tak segan melakukan investigasi kecil-kecilan untuk mengungkap praktek tersebut. Caranya, Nova meminta si calo untuk mencarikan tiket yang oleh loket resmi dinyatakan sudah habis terjual. Hasilnya, tak lama berselang si calo memberinya tiket sesuai nama dan identitasnya, dengan perbedaan harga yang lumayan besar. Namun demikian, Nova enggan menyebutkan nama ‘oknum’ intern Bandara Kualanamu yang terindikasi membekingi praktek percaloan

tersebut.

Dirut PT. Angkasa Pura II (AP II) Tris S Sunoko mengatakan persiapan lebaran sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, termasuk dengan menindak tegas para calo tiket. Sebagai bukti, lanjut Tri, para calo tiket yang tertangkap tangan pada arus mudik tahun lalu sudah diproses melalui jalur hukum. “Upaya tegas tersebut untuk memberi efek jera bagi siapapun yang berusaha mengganggu kenyamanan calon penumpang pesawat, dengan menjadi calo tiket,” tegas Tri.

Tri meminta dengan sangat semua penumpang pesawat, tidak terkecuali pejabat, menaati peraturan dengan membeli tiket sesuai dengan identitas diri, jika aturan tersebut dilanggar maka pihak AP II tidak segan-segan untuk bertindak tegas dan dilarang naik ke pesawat. (od)foto:naefuroji/parle/hr

Perusahaan Angkutan Diminta Tak Naikkan Tarif Seenaknya

Komisi V DPR meminta kepada perusahaan angkutan baik darat, laut dan udara tidak seenaknya menaikkan tarif angkutan lebaran. Masyarakat harus dibantu kelancaran, keselamatan dan kenyamanannya untuk merayakan hari raya Idul Fitri dan jangan dibebani ongkos angkutan yang memberatkan.

Demikian ditegaskan anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo usai mengadakan kunjungan kerja spesifik memantau kesiapan angkutan lebaran di Jawa Timur, baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena saat menggelar pertemuan dengan Kadishub, Angkasa pura I, BMKB dan Basarnas serta instansi terkait di Jatim juga menyampaikan hal serupa agar para pemudik jangan dibebani tarif tiket yang memberatkan. Perusahaan angkutan umum diharapkan bisa menetapi ketentuan pemerintah melalui tarif batas bawah dan batas atas, sehingga tidak memberatkan para pemudik.

Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama saat memimpin Tim Kunker Spesifik ke Bandara Soekarno Hatta juga menyampaikan hal yang sama agar maskapai penerbangan tidak menaikkan tarif angkutan lebaran ini seenaknya. Masalah ini perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya sehingga masyarakat yang menggunakan berbagai moda angkutan lebaran baik angkutan udara, laut dan angkutan darat bisa merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman serta selamat sampai kampung halamannya.

Menurut Sigit Sosiantomo, terkait masalah tarif angkutan lebaran ini sudah diatur melalui Keputusan Menteri (Kepmen). “Saya memperlakukan di terminal Purabaya, Bungurasih, Surabaya supaya tarif batas atas ditempel di semua bus sehingga calon penumpang mengetahui secara jelas. Pengaturan ini supaya diinformasikan dan dan terus disosialisasikan,” tegas politisi PKS ini.

Dijelaskan Sigit, secara jujur harus diakui sebetulnya



Tim Komisi V DPR berdialog dengan Pimpinan PT KAI Surabaya

pemerintah dalam melayani masyarakat dibantu oleh sektor swasta termasuk dalam melayani angkutan lebaran. Tetapi karena pemerintah tidak mampu, swasta diikutsertakan dan dengan beban yang bertambah membuat awak bus atau angkutan kelelahan serta tambahan kerja diluar waktu yang ditentukan sehingga berdampak kepada kenaikan tiket.

Oleh karena itu sudah diambil kebijakan melalui kebijakan tarif batas bawah dan batas atas. “Ini tugas pemerintah untuk mensosialisasikan,” ujar Sigit dengan berharap, ketentuan tarif batas bawah dan batas atas supaya dijaga sehingga masyarakat tidak ditipu diatas bus.

Saat ditanyakan, bagaimana kalau ada yang melakukan pelanggaran sebab kasus seperti ini selalu terjadi pada lebaran, menurut anggota Komisi V DPR ini harus dikenakan sanksi. “Sanksi bagi pelanggaran perusahaan angkutan penumpang ini bisa berupa pencabutan izin usaha,” ia menjelaskan. (mp)foto: mp/parle/hr.

Komisi IV Temukan Buruknya Kualitas Raskin

Komisi IV DPR RI menemukan sejumlah masalah dalam pengadaan beras Bulog di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Provinsi NTB, baru-baru ini.

“Permasalahan tersebut diantaranya kondisi beras yang ada di gudang Bulog NTB yang ternyata masih terdapat minor di beberapa contoh karung beras yang kita lihat. Padahal seharusnya Bulog memiliki *quality control* untuk menyaring bahkan menolak beras dari mitra kerja yang tidak bagus,” kata Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam di Lombok, NTB.

Ditambahkan Ibnu, meski beras dalam Bulog ini termasuk dalam raskin (beras untuk rakyat miskin), namun bukan berarti kualitasnya dikesampingkan begitu saja. Selain itu, Tim Kunker Komisi IV DPR juga menemukan ada beberapa karung beras yang sampul belakangnya (*back cover*) tidak mencantumkan perusahaan yang menjadi mitra kerja Bulog dalam menyediakan beras.

Padahal menurut Politisi dari Fraksi PKB ini, dalam SOP (*Standard Operational Procedure*) yang telah disepakati bahwa identitas perusahaan mitra Bulog yang menjadi penyedia beras wajib mencantumkan pada setiap karung beras.

Hal ini untuk mengetahui kualitas beras dari masing-masing mitra kerja Bulog. Dengan begitu jika ditemukan beras dengan kualitas yang sangat rendah dapat segera



Tim Kunker Komisi IV DPR meninjau gudang Bulog di NTB

diketahui perusahaan penyedia, sehingga ke depannya Bulog dapat mengevaluasi kembali kerjasama atau proses kemitraannya dengan perusahaan tersebut.

Sementara itu, Direktur Keuangan Bulog, Budi Purwanto yang ikut mendampingi Tim Kunker Komisi IV DPR mengatakan, akan segera menindaklanjuti temuan dari DPR tersebut dengan mengevaluasi beberapa mitra kerjanya yang memang belum sepenuhnya menjalankan SOP yang telah disepakati bersama. Hal tersebut semata untuk memperbaiki pelayanan terbaik pada rakyat Indonesia secara keseluruhan. (Ayu) foto: ayu/parle/hr.

Komisi VIII Soroti Tingginya KDRT di Merauke

Komisi VIII DPR menaruh perhatian besar terhadap penanganan perlindungan anak dan perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena berdasarkan data yang diterima Komisi VIII DPR diketahui bahwa Kabupaten Merauke Propinsi Papua Jayapura angka KDRT sangat tinggi. Demikian dikatakan Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR Hj. Ledia Hanifa Amaliah saat melakukan kunker ke Merauke, baru-baru ini.

Ledia mengemukakan, setiap tahun di Merauke angka korban yang melaporkan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terus meningkat dan kian mengkhawatirkan. “Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah dan jajaran Pemda Merauke

Berencana kabupaten Merauke telah menangani sekitar 200 kasus KDRT. Jumlah tersebut telah meningkat 10 persen dari tahun sebelumnya belum lagi yang tidak berani melaporkan dalam korban kekerasan dalam rumah tangga bisa lebih banyak dari yang

melapor,” ungkapnya.

Sementara Kepala Bapermas P2AKB Albeertina Mekiuw mengatakan, problem KDRT ibarat fenomena gunung es, karena itu pihaknya menghimbau para korban KDRT agar mau menginformasikan kekerasan yang dialami pada pihak terkait.

Dia mengemukakan, memang perlu keberanian dan pengobanan untuk membuka aib keluarga. Namun dalam pantauan masih banyak para istri yang takut untuk melapor karena masih menjaga citra dan nama baik suaminya, meskipun sudah dalam posisi terancam.

Menurut Albeertina, dari 200-an ka-

sus yang didampingi Bapermas, mayoritas KDRT menimpa pihak istri akibat suami dipengaruhi minuman keras (miras). karena itu, pihaknya berupaya mengadvokasi ke pemerintah dan berbagai elemen untuk sama-sama memerangi miras, bahkan meniadakannya.

Sementara itu, lanjutnya, pemerintah sendiri sudah mengeluarkan

aturan hukum yang bisa menjerat pelaku KDRT, seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga namun, kendala yang terbesar dalam menuntaskan suatu masalah KDRT melalui jalur hukum, biasanya korban KDRT mencabut delik aduan yang telah dilaporkan pada pihak kepolisian, dengan alasan akan diselesaikan

secara kekeluargaan.

Dia mengemukakan bahwa memang harus diingat KDRT sebenarnya tidak hanya kekerasan terhadap fisik tetapi juga psikis, yang cenderung menimpa kaum perempuan dan anak, hanya saja kondisi budaya patriarki menganggap hal tersebut sebagai masalah biasa, jelasnya. (spy). foto:ayu/parle/hr.

Komisi IV Dorong Penyelesaian PPN Teluk Awang

Komisi IV DPR RI dorong penyelesaian dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang, Lombok Tengah, NTB.

“Selain memonitori progres atau perkembangan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana produksi PPN Teluk Awang yang telah dianggarkan sejak 2004, kami juga memberikan komitmen pada para nelayan penerima manfaat proyek tersebut, dimana untuk anggaran tahun 2015 kami akan mengkonsentrasikan pada penyelesaian dan pengoptimalan PPN Teluk Awang,” ungkap Ketua Komisi IV Romahurmuziy, baru-baru ini.

Romy, begitu ia biasa disapa menjelaskan pada awal penancangan proyek ini pada 2004 silam menganggarkan dana (total disain capacity) sebesar 116 Miliar. Namun seiring dengan inflasi dan meningkatnya kenaikan harga barang maka anggaran yang dibutuhkan membengkak hingga 163 Miliar. Namun baru sekitar 47 Miliar dana yang tersedia dan bisa dikururkan untuk proyek ini. Karena terbatasnya anggaran itulah, maka rencana pembuatan PPN ini menjadi mangkrak atau mandek.

Hal tersebut terlihat dengan reklamasi pembuatan dermaga yang belum tuntas. Talut yang digunakan untuk membentuk adanya dampak pembuatan dermaga juga belum dijalankan. Pembuatan PPN Teluk Awang sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi nelayan dan masyarakat Teluk Awang dan NTB secara keseluruhan, maka Romy bertekad mengonsentrasikan anggaran Tahun 2015 mendatang untuk penyelesaian dan pengoptimalan Teluk Awang ini.

“Kami melihat Teluk Awang ini sangat potensial untuk dijadikan PPN, yang sebelumnya hanya TPI (tempat pelelangan ikan). Mengingat Teluk Awang berada pada posisi strategis, menghubungkan dua samudera serta lokasi yang bisa dijangkau oleh beberapa provinsi, maka saya yakin perubahan tersebut akan meningkatkan perekonomian masyarakat, daerah dan Negara. Oleh karenanya kami akan mengonsentrasikan anggaran 2015 guna penyelesaian PPN Teluk Awang. Prinsip kami, sedikit lokasi, banyak alokasi. Percuma kalau banyak tempat yang dikururkan dana namun hasilnya tidak maksimal. Lebih baik sedikit lokasi



Tim Kunker Komisi IV DPR saat temu wicara dengan nelayan Teluk Awang. Lombok Tengah

yang dituju, namun mendapat anggaran yang cukup besar, sehingga program-programnya pun akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran,”papar Politisi dari Fraksi PPP ini.

Romy menambahkan, sangat tidak mungkin dalam merealisasikan rencana pembuatan PPN dengan pelabuhan yang besar lengkap dengan sarana dan prasarana lainnya hanya dengan menggunakan anggaran daerah saja. Butuh bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu penyelesaian program ini. Dimana awalnya pengelolaan dilakukan oleh daerah, menjadi pemerintah pusat. Dalam hal ini bukan sebatas kepemilikan, namun juga dalam rangka menejemen pengelolaannya.

Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPR, Anton Sihombing berharap agar para nelayan dan masyarakat Teluk Awang, NTB tidak patah semangat. Dengan kata lain para nelayan juga harus turut menjaga dan melestarikan ekosistem yang ada. Karena jika tercemar, bukan tidak mungkin segala kekayaan alam yang ada di daerah tersebut akan hilang atau lenyap. Sebagaimana diakui para nelayan setempat bahwa kawasan Teluk Awang kaya akan udang besar atau lobster yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Setiap tahunnya di teluk ini dapat menghasilkan dan mengespor udang besar dengan jumlah 4 (empat) juta ekor. (Ayu) foto: ayu/parle/hr.

Pilpres 2014 Terbaik Sepanjang Sejarah Pemilu



Anggota DPR RI Siswono Yudo Husodo

Pemilu Presiden (Pilpres) pada 2014 ini merupakan pemilihan terbaik sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia. Dari sisi partisipasi dan transparansi, KPU sudah bekerja sangat baik dalam menyelenggarakan Pemilu.

Demikian disampaikan Anggota DPR RI Siswono Yudo Husodo kepada para wartawan di Ruang Pimpinan Badan Kehormatan (BK) DPR, Kamis (24/7). “Saya telah mengikuti pemilihan umum sejak tahun 1971 dan mengikuti banyak sekali Pilkada. Jujur saya mengatakan, Pilpres kali ini yang terbaik yang pernah berlangsung di Tanah Air,” nilai Siswono.

Politisi Partai Golkar tersebut, mengungkapkan, dua parameter yang menjadi kesuksesan Pilpres kali ini adalah tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan transparansi penyelenggaraan Pilpres dari tahap awal hingga penetapan presiden terpilih. Dalam sejarah Pemilu Indonesia, baru kali

ini Pilpres diikuti dua pasang. Dan KPU telah menyelenggarakan Pilpres dengan sangat baik di tengah rivalitas dua kandidat yang sangat ketat.

Wakil Ketua BK DPR ini, lalu membandingkan dengan Pilpres di Afganistan dan Thailand yang sangat buruk, karena menelan banyak korban. Dengan Pilpres kali ini, Indonesia mestinya bisa menjadi contoh terbaik bagaimana harus menyelenggarakan Pilpres. “Harusnya kita bisa menjadi contoh bagi negara lain kalau saja semua orang bisa menerima dengan sportif hasil Pilpres ini.”

Dalam kapasitasnya sebagai kader Golkar, Siswono juga menghimbau Ketua Umum Golkar segera memberi ucapan selamat kepada presiden dan wakil presiden terpilih untuk dilantik pada 20 Oktober. Menurutnya, hal ini penting untuk menunjukkan sportifitas dalam berdemokrasi yang sehat.

Siswono memuji sikap para elit partai di PPP dan Demokrat yang sudah memberi ucapan selamat kepada pasangan Jokowi dan JK. “Ini sikap yang baik dan sportif yang harus diikuti ketua umum Golkar,” timpal Siswono. Jiwa besar harus ditunjukkan para elit politik dalam berdemokrasi. Ini bagian dari pendidikan politik pula.

“Pilpres kita sudah selesai. Kita harap yang menang tidak merendahkan yang kalah. Dan yang kalah menghormati yang menang. Ada sebuah pepatah Inggris yang menarik yang perlu diresapi oleh para pihak yang terlibat, *it's better to be a good loser than to be a bad winner.*” Siswono memuji Jokowi sebagai presiden terpilih yang tidak merayakan secara berlebihan sebagai pemenang dalam Pilpres.

Ditambahkan Siswono, dalam sejarahnya, Golkar tidak pernah menjadi oposisi. Ia selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Dan kalau pun menjadi oposisi, tidak harus menampilkan perbedaan yang diametral. (mh) foto: naefurodjie/parle/hr.

Komisi IV DPR Apresiasi Pengelolaan HKM Desa Aik Berik

Komisi IV DPR RI mengapresiasi pengelolaan HKM (Hutan Kemasyarakatan) Desa Aik Berik, Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal tersebut terungkap ketika Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR yang dipimpin Ketua Komisi IV, Romahurmuziy mengunjungi langsung masyarakat Desa Aik Berik, Batukliang, Lombok Tengah, NTB, baru-baru ini.

“Kami sangat mengapresiasi program HKM yang telah

dilakukan masyarakat Desa Aik Berik. Program HKM ini merupakan salah satu alternatif terbaik untuk melestarikan hutan dan mencegah terjadinya degradasi hutan akibat pembalakan liar,” jelas Politisi dari Fraksi PPP ini.

Selain itu, disini lain HKM ini sekaligus juga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui nilai ekonomis yang dihasilkan kawasan hutan ini. Sebut saja pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang menjadi penghasilan utama masyarakat sekitar, se-



Pimpinan Komisi IV DPR saat menyerahkan bantuan mesin pengering biji kopi

perti tanaman kopi, kemiri, coklat, durian, vanila, pinang, talas, dan pisang disela-sela tanaman kayu.

“Dari hasil panen tanaman tersebut saja, masyarakat sekitar bisa mendapat penghasilan minimal 1,5 juta per bulannya. Belum lagi dari agrowisata, setiap harinya sekitar 100 turis asing yang mengunjungi kawasan ini. Dengan keasrian hutan dan keindahan beberapa air terjun di dalamnya membuat lokasi ini kerap dikunjungi wisatawan asing. Kondisi tersebut tentu mendatangkan penghasilan tersendiri,” papar Romy.

Pada kesempatan itu, Komisi IV juga memberikan sejumlah bantuan berupa mesin pengolah biji kopi dan biji kemiri, serta mesin pengering (*frying dry*) agar hasil panen yang dihasilkan memiliki kualitas pengolahan yang lebih maksimal, hingga akhirnya dapat meningkatkan nilai jual terhadap hasil panen.

Selain memberikan bantuan, Tim Kunker Komisi IV juga menyempatkan diri untuk menanam sejumlah pohon di kawasan hutan Aik Berik, Batukliang, Lombok Tengah, NTB. (Ayu) foto: ayu/parle/hr.

Pemerintah Belum Beri Perhatian Serius Pustakawan

Peran perpustakaan sebagai salah satu unsur dalam mencerdaskan kehidupan bangsa masih dipandang sebelah mata. Pustakawan, sebagai sumber daya manusia utama dalam penyelenggaraan perpustakaan, belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Hal ini menjadi temuan saat Komisi X DPR melakukan kunjungan kerja ke Badan Perpustakaan dan Arsip Nasional Daerah Bali.

“Perlu diformat ulang dalam mencari sumber daya manusia untuk menangani perpustakaan. Hal pertama yang mesti dilakukan adalah sosialisasi jurusan Ilmu Perpustakaan yang mesti digalakkan lagi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apalagi universitas yang memiliki jurusan ini tidak banyak,” jelas Anggota Komisi X DPR Herlini Amran, usai meninjau kondisi lapangan di Bali, baru-baru ini.

Politisi F-PKS ini memperhatikan, selama ini banyak pihak yang menilai masa depan pustakawan itu terkesan suram. Padahal, Indonesia sangat membutuhkan tenaga-tenaga pustakawan.

“Dari hasil pemantauan saya di lapangan, SDM yang ditempatkan di perpustakaan adalah orang-orang

yang terbuang. Perlu merubah *mind-set* bahwa pustakawan masih dibutuhkan di Indonesia, dan bukan pekerjaan yang terbuang,” tambah politisi asal Dapil Kepulauan Riau ini.

Herlini menambahkan, perlu ada kreatifitas dari Kemendikbud dalam menyosialisasikan jurusan ini kepada calon peserta didik baru, bahwa jurusan Ilmu Perpustakaan juga memiliki prospek masa depan yang bagus, karena sangat dibutuhkan.

“Pemerintah juga harus memperhatikan jenjang karir pustakawan di Badan Perpustakaan, baik pusat maupun daerah. Jadi perlu perlakuan yang sama kepada pustakawan. Namun itu kembali ke otonomi daerah, karena masih ada daerah yang memandang sebelah mata peran pustakawan,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Nasional Daerah Bali Luh Putu Haryani menyatakan bahwa pihaknya masih minim pustakawan, apalagi pustakawan yang ada tak lama lagi menghadapi pensiun.

“Dalam rekrutmen SDM Badan Perpustakaan itu belum ada yang



Anggota Komisi X DPR Herlini Amran

khusus memiliki latar belakang pendidikan pustakawan. Jadi kami mohon jika nanti ada rekrutmen CPNS ke depannya, ada khusus penerimaan pustakawan. Belum lagi, pustakawan yang ada sekarang, ke depannya pasti akan menghadapi masa pensiun, sehingga perlu regenerasi,” jelas Haryani.

Ia mengakui, saat ini jumlah pustakawan di instansi yang ia pimpin hanya ada 16 orang. Padahal tugas pustakawan ini cukup banyak, salah satunya memberikan pembinaan perpustakaan di sekolah-sekolah, di kabupaten maupun kota di Provinsi Bali.

“Soal koleksi buku selalu kita tambah terus. Sekarang mencapai 114 ribu buku, dengan 816 judul buku. Setiap bulannya, kami berusaha menambah

koleksi buku,” tambah Haryani.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto mengusulkan agar Ju-

rusan Ilmu Perpustakaan memberikan beasiswa kepada peserta didiknya, sehingga dapat meningkatkan peminatannya. Untuk tenaga pustakawan,

menurutnya perlu diberikan insentif yang memadai, agar dapat meningkatkan kinerjanya. (sf) foto: sofyan/parle/hr.

52 Persen Anggaran Pendidikan Tersedot ke PT



Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto saat pertemuan dengan Universitas Halu Oleo

Sebesar 52 persen anggaran pendidikan nasional tersedot ke perguruan tinggi (PT), ketimbang untuk pendidikan dasar dan menengah. Ini lantaran, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi pula kebutuhannya.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR Utut Adianto menyampaikan hal tersebut di Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Soal kebutuhan pendidikan untuk Sultra, Komisi X DPR selalu berusaha memperjuangkannya. Khusus anggaran untuk kampus Halu Oleo, sebelumnya hanya berkisar Rp16 miliar. Jauh bila dibandingkan dengan kampus UI yang mendapat Rp235 miliar.

“Bantuan anggaran bagi Universitas Halu Oleo mestinya jauh lebih besar daripada kampus UI dan ITB,” katanya, di kampus UHO, Kendari, baru-baru ini. Kunjungan ke kampus UHO ini merupakan rangkain dari kunjungan kerja ke Sultra, untuk mengetahui potensi dan problematika pendidikan di Sultra.

Hadir dalam pertemuan tersebut para anggota tim kunjungan kerja Komisi X, di antaranya Surahman Hidayat (F- PKS), Ferdiansyah (F-PG), Zulfadhli (F-PG), dan Budi Heryadi (F-Gerindra). Hadir pula Purek III UHO, Ketua Kopertis IX wilayah Sulawesi, para guru besar, dosen, dan mahasiswa.

Jurusan unggulan di kampus UHO adalah jurusan perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Karena di Sultra banyak pula lahan pertambangan, UHO pun telah menyiapkan para sarjana di bidang pertambangan lewat jurusan Ilmu Pertambangan dengan konsentrasi Rekayasa Sosial Tambang dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Kampus UHO telah mencetak 46.617 lulusan dari berbagai jurusan. Saat ini, mahasiswa aktifnya berjumlah 35.012 orang dan sekitar 2000 lebih akan segera diwisuda. Jumlah tenaga pengajar 1.065 dosen, dan guru besar sebanyak 42 orang. Uniknyanya, sebelum diwisuda, para mahasiswa UHO yang telah dinyatakan lulus akan menerima pelatihan ESQ untuk meningkatkan kecerdasan spiritual para lulusannya.

(mh) foto: husen/parle/hr.

Pembangunan SPBN Jangan Disamakan dengan SPBU

Anggota Komisi VII DPR RI, Asmin Amin menyoroti persoalan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kepulauan Selayar yang diperlakukan sama dengan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Pertamina bilang itu tergantung

Pemerintah Daerah, sedangkan Pemerintah Daerah bilang Pertamina tidak memberi kuota sehingga tidak diberi tempat membangun SPBN. Kemudian Pertamina bilang lagi harus ada syarat ini dan syarat itu,” ujar Asmin saat pertemuan dengan PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V Surabaya dalam rangka kunjungan

spesifik Komisi VII DPR terkait ketersediaan BBM dan LPG 3 Kg bersubsidi, baru-baru ini.

Menurut politisi F-PKS ini, mestinya Pertamina jangan memberlakukan sama antara pembangunan SPBU dengan SPBN. Karena mereka adalah masyarakat yang betul-betul nelayan



Anggota Komisi VII DPR Asmin Amin saat pertemuan dengan PT Pertamina dan jajarannya

miskin, sama juga yang ada NTB, mereka sangat susah untuk membuat SPBN.

Asmin mengatakan, negara kita ini adalah negara benua atau negara kepulauan yang terdiri lebih dari 13 ribu kepulauan, tetapi hampir semua sistem dukungan untuk menterjemahkan sebagai negara benua ini lemah. Ia memberi contoh, di Kepulauan Selayar masyarakat nelayan disana membeli minyak itu hampir Rp 20 sampai Rp 30 ribu.

“Kalau membuat SPBN itu diperlakukan sama dengan membuat SPBU, dan mereka selalu bicara itu adalah tergantung kebijakan Pemerintah Daerah atau tergantung SKPD, ini membingungkan” tukasnya.

Ditegaskan Asmin, keberadaan pulau-pulau kecil ini penting sementara selalu masyarakat nelayan dianggap tidak penting, akhirnya kemampuan jelajah masyarakat nelayan kita kurang. Akibatnya kita kecurian Rp 40

Triliyun lebih per tahun dari hasil laut kita. “Seandainya kemampuan jelajah nelayan kuat, mereka tidak akan berani mencuri hasil dari laut kita,” ujar politisi F-PKS.

Menanggapi hal tersebut diatas, General Manager PT. Pertamina Operating Region V Surabaya, Giri Santoso menjelaskan memang itu persyaratan perizinan yang harus ada. “Jadi tidak ada tambahan-tambahan dari Pertamina yang buat susah, saya juga pelajarinya itu,” kata Giri.

Bahkan untuk SPBN kalau mengurus surat dan ada penjelasannya, kata Giri, sudah bisa eksekusi, yang penting nomor satu safety-nya dulu. Kalau safety-nya oke, izin-izin menyusul itu tidak apa-apa karena ini sedang dalam pengurusan, tidak seperti SPBU.

“Jadi untuk SPBN memang sudah cukup kita kasih toleransi, tapi nanti kita akan evaluasi lagi mungkin bisa ada yang lebih mudah lagi,” imbuhnya.

(iw)/foto:iwan armanias/parle.

Jepang Dukung Indonesia Kembangkan Sumber Daya Energi

Anggota Parlemen Jepang mendukung Indonesia dalam mengembangkan sumber daya energi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jepang mengakui, Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya energi, salah satunya sumber energi geothermal (panas bumi).

Hal ini terungkap saat pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman dengan Komisi Anggaran Parlemen Jepang yang diketuai oleh Toshihiro Nikai. Dalam kesempatan ini, Sohibul didampingi segenap jajaran Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI.

“Jepang melihat Indonesia memiliki potensi geothermal yang tinggi, karena itu mereka meminta untuk dikembangkan secara baik. Bahkan, Jepang siap membantu dan mendukung Indonesia mengembangkan geothermal,” kata Sohibul usai pertemuan, di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Kamis (24/07).

Selain itu, Jepang juga melihat sumber daya energi lain yang bisa dikembangkan, yaitu bahan bakar kayu. Apalagi, Universitas Kyoto Jepang juga sudah mengembangkan teknologi bahan bakar kayu untuk pembangkit tenaga listrik.



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman

“Jepang melihat Indonesia mempunyai sumber energi yang lain, misalnya sumber daya kayu. Universitas Kyoto sudah mengembangkan teknologi dengan menggunakan bahan bakar kayu untuk membangkitkan tenaga listrik. Indonesia memiliki beragam sumber daya energi, sehingga mereka menginginkan Indonesia dapat mengembangkan potensi itu,” imbuh Politisi PKS ini.

Dalam kesempatan ini juga disinggung tentang hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Sohibul mengakui, investasi Jepang di ASEAN, Indonesia merupakan lokasi investasi Jepang yang terbesar. Walaupun, masih

kalah besar jika dibandingkan investasi Jepang di China ataupun Amerika.

“Dengan mereka menganggap Indonesia sebagai negara yang penting, kita harapkan Jepang semakin meningkatkan investasi mereka. Kita juga berharap dapat meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Jepang dalam beragam bidang. Apalagi Jepang mengatakan Indonesia memiliki peran penting bagi Jepang, dalam meningkatkan perkembangan di Kawasan ASEAN. (sf)/foto:andri/parle

Sekjen DPR Serahkan Zakat untuk Mustahik

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Winantuningtyastiti menyerahkan zakat kepada 122 mustahik yaitu para petugas yang bekerja merawat taman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Zakat berhasil dihimpun oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) DPR dari para muzakki di lingkup kesetjanaan.

“Alhamdulillah Ramadan ini kita bisa saling berbagi lagi, banyak teman yang bekerja di sini ingin berbagi dengan bapak-bapak yang bertugas di taman, ada yang bertugas di taman rusa, di lingkungan mesjid. Tolong jangan dilihat jumlahnya tapi kekeluargaan, kebersamaan kita yang sama-sama berjuang di gedung ini,” katanya dalam acara pembagian zakat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/14).

Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada para petugas yang bekerja di luar gedung merawat taman dan lingkungan. Peran mereka menurutnya sama penting dan mulianya dengan karyawan yang bekerja di dalam gedung apalagi kawasan parlemen termasuk *heritage* yang harus dijaga karena memiliki nilai sejarah bagi bangsa.

“Taman dan lingkungan yang tertata baik akan mempengaruhi produktivitas kerja kita. Kawasan DPR ini termasuk *heritage* yang harus dijaga, orang berkunjung kesini tidak hanya belajar tentang DPR tapi ada juga yang berwisata ilmu, melihat keindahan gedung bersejarah, museum dan untuk melengkapinya kita siapkan juga taman rusa,” paparnya.

Sekjen dalam kesempatan itu menyerahkan secara simbolis zakat kepada salah seorang mustahik kemudian menyapa secara langsung para petugas ini. Tawir salah seorang petugas taman rusa yang sudah bekerja selama 3 tahun menjelaskan wilayah kerjanya sering dikunjungi anggota DPR dan para tamu.

“Banyak juga yang datang ingin melihat rusa, ikut memberi makan. Ada juga anggota DPR yang khusus datang ke taman bersama cucunya,” ungkap Tawir yang setiap 2 hari sekali khusus mendatangkan rumput untuk makanan rusa dari wilayah Bogor.



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti menyerahkan zakat

Sementara Feri Nurman petugas taman menjelaskan setiap hari ia mengumpulkan sampah daun dan ranting sebanyak 3 gerobak dari kawasan hutan kota di Gedung DPR yang cukup luas. Ia mengusulkan alangkah baiknya DPR memiliki unit pengolah sampah sendiri.

“Sampah daun di sini tidak boleh dibakar, polusi katanya. Jadi diantar ke tempat pembuangan di Velbak. Kalau bisa diolah sendiri bagus ya, hasilnya dimanfaatkan untuk pupuk,” tutur Feri yang mengaku sudah bekerja di taman DPR selama 16 tahun.

Sekretaris UPZ DPR Ikhsanudin menjelaskan program berbagi lewat zakat ini sudah berlangsung secara rutin sejak tahun 2009. Ia mengimbau semakin banyak karyawan kesetjanaan dan anggota DPR yang mempercayakan zakatnya ke unit yang dikelolanya. “Kita terus kembangkan agar para muzakki lebih tersentuh dan meningkatkan zakat profesinya disini,” pungkask dia. (iky)/foto:andri/parle/hr.

Presiden Terpilih adalah Presiden Kita



Ketua DPR RI Marzuki Alie bersama wartawan

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengimbu segenap potensi bangsa untuk dapat berbesar hati menerima hasil Pemilu Presiden 2014. Ia mengakui bisa saja ada yang merasa kecewa dengan hasil pemilu karena kandidat yang didukungnya tidak terpilih namun atas nama demokrasi lebih baik fokus ke depan, pada tujuan bangsa.

“Kita boleh beda pilihan, berbeda sikap, itulah demokrasi. Namun manakala sudah selesai dan sudah ada yang terpilih kita harusnya kembali bersatu, yang paling penting bagaimana lima tahun kedepan presiden terpilih bisa membawa Indonesia ke arah lebih baik. Apapun hasilnya, presiden terpilih adalah presiden kita,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/14).

Ia juga menyampaikan rasa syukur karena pemilu berjalan aman dan damai. Pada saat kampanye tensi memang terasa tinggi, persaingan kandidat dan tim sukses terlihat keras. Namun seluruh proses masih berjalan sesuai koridor terbukti tidak ada konflik horizontal yang terjadi. Baginya ini menunjukkan masyarakat sudah lebih paham bagaimana memaknai nilai-nilai demokrasi.

Pada bagian lain ia berharap Presiden terpilih bersama seluruh pendukungnya agar bijaksana dalam merayakan kemenangan. Bagaimanapun kontestasi antara dua kandidat telah membuat anak bangsa saling berhadapan dalam dua kelompok besar pemikiran yang berbeda.

“Yang menang tidak perlu euforia

berlebihan, seolah keberhasilan ini segalanya. Dalam kontestasi dimana 2 kandidat berhadapan dan perolehan suara hampir sama, akan ada pihak yang merasa disakiti kalau dirayakan berlebihan. Jadi yang menang harus menimbang perasaan yang kalah, yang kalah saatnya mendukung yang menang,” tutur Marzuki yang dalam Pilpres lalu berada dalam barisan Koalisi Merah Putih.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menggarisbawahi koalisi yang belum berhasil dalam Pilpres dapat menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah. Namun itu bukan berarti selama lima tahun akan terus berbeda, program kerakyatan yang tujuannya membesarkan bangsa menurutnya tentu harus didukung. (iky) foto: andry/parle/hr



Pertemuan Wakil Ketua DPR Sohibul Iman didampingi Anggota Banggar DPR dengan Komisi Anggaran Parlemen Jepang, Kamis (24/7). Foto: Andry/Parle/Hr.



Pertemuan Tim Kunker Komisi VII DPR dengan PT Pertamina dan BPH Migas Surabaya, Senin (21/7). Foto: IwanArmanias/Parle/Hr.



Tim Kunker Komisi VII DPR meninjau ketersediaan elpiji di SPBU 41 502 01, Semarang, Minggu (20/7). Foto: Sugeng/Parle/Hr.



Acara Buka Puasa Pengurus RW Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata dengan anak yatim, Pamdal, dan Karyawan RJA DPR RI, Kamis (24/7). Foto: Naefurodjie/Parle/Hr.

